

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi yang memiliki slogan “*Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat*”. Salah satu peran penting masyarakat dalam Negara Demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintahan pusat atau daerah.¹

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari politik modern. Adanya keputusan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah yang akan mempengaruhi kehidupan warga negara, oleh karena itu warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu, yang dimaksud untuk setiap warga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, efektif dan tidak efektif dan secara damai.

Di dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang akhir – akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta aktif dalam kehidupan politik, dengan tujuan untuk memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti : memberikan suara dalam pemilihan umum, “voting” ; menghadiri rapat umum, “campaign”; menjadi anggota suatu partai atau kelompok

¹ M. Zaenor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten” Tahun 2015, h. 81

kepentingan, “*contacting*” mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya.²

Hubungan dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintah. Dalam pemilihan umum, misalnya partisipasi politik berpengaruh dalam legitimasi masyarakat terhadap pasangan calon yang terpilih. Karena setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam pemilu bisa tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Partisipasi politik dalam pemilu dapat diartikan sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan partisipasi politik masing – masing masyarakat. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Hal yang terpenting dalam pemilihan umum adalah partisipasi dari semua warga lokal yang sudah mempunyai hak pilih, karena kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat.³

Diselenggarakannya pemilihan umum selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat juga sebagai upaya memilih wakil rakyat, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam

² Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal 183

³ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995. Hlm.56

menyelenggarakan pemerintahan negara, bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi, meskipun demokrasi berbeda dengan pemilu, namun pemilu merupakan aspek penting demokrasi dan harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu merupakan salah satu dari sekian banyaknya hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam rangka pelaksanaan hak – hak asasi warga negara, ada suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyat adalah yang berkuasa. Sekarang di era demokrasi dengan pemilu yang diadakan secara langsung banyak terjadi golput di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat bersikap tidak peduli, cuek dan masa bodoh terhadap kehidupan politik yang ada disekitarnya. Fenomena ini dikarenakan banyak pejabat pemerintahan yang sering melakukan pelanggaran seperti korupsi dan pelanggaran lainnya sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah. Faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi kurangnya angka pemilih, baik dari tingkat pemilihan kepala daerah sampai kepada pemilihan umum legislatif dan presiden.

Di dalam pemilu tahun 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu di tahun 2019 akan dilakukan secara serentak. Dengan keputusan tersebut pemilu di tahun 2019 dilakukan dengan lima kotak suara, yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan perwakilan rakyat (DPR), di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.⁵

⁴ Achmad Sulchan, 2016, *Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*, Publishing, Semarang, h.10.

⁵ Lihat putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

Tahun 2019 tidak terlepas dari ramainya suasana politik dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang dilaksanakan secara serentak seperti Pileg dan Pilpres, puncaknya berlangsung pada tanggal 17 April 2019 kemarin. Segala aktivitas dan strategi elit politik untuk meraih dukungan suara masyarakat, telah mengisi halaman berita yang menjadi isu pokok sehari-hari. Mulai dari pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden hingga calon legislatif, pendaftaran dan pelaksanaan kampanye. Hal ini merupakan bentuk kegiatan pemilu yang akan menghasilkan dinamika gambaran politik di Indonesia.

Pemilu serentak 2019 telah selesai dilaksanakan, terlepas dari apapun hasil dan siapa pemenangnya, sistem yang dijalankan telah mengarah kepada politik mobilisasi dari pada demokrasi itu sendiri. Mobilisasi secara sederhana selalu dilawankan dengan partisipasi. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Keikutsertaan warga dalam proses politik bukan hanya berarti, warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Saat ini aktivitas politik juga memasuki dunia keagamaan, ekonomi, sosial, kehidupan pribadi. Oleh karena itu, masuknya budaya politik secara langsung akan mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional mengenai pola alokasi sumber daya masyarakat. Karena budaya politik adalah bagian dari kehidupan politik, meskipun banyak yang berpendapat bahwa budaya politik hanyalah kondisi yang mencirikan gaya hidup sosial dan tidak memiliki hubungan baik dengan sistem politik. Keterkaitannya budaya politik dengan sistem politik, budaya politik perlu diutamakan karena menyangkut ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena sosial. Karena setiap masyarakat mempunyai sistem politik tradisional maupun dalam sistem politik

modern, maka mereka memiliki sistem budaya politik tertentu.⁶

Keberadaan pondok pesantren di Indonesia merupakan suatu lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan dengan menyelenggarakan pembelajaran pendidikan berbasis agama Islam. Pesantren adalah sebuah komunitas atau kelompok kecil yang hidup berdasarkan nilai – nilai agama Islam. Salah satu unsur penting dari pesantren adalah kiai. Kiai merupakan pendiri, pemilik dan pengurus pondok pesantren. Di dalam pesantren juga memiliki peraturan yang tegas dan ketat untuk mengekang para santri agar mengikuti aturan yang dibuat untuk mendidik para santri agar lebih disiplin dan mandiri. Para santri yang telah lulus menempuh pendidikan di pondok pesantren, maka para santri diharuskan dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar

Di Sisi lain komunitas santri merupakan salah satu kelompok terpenting dalam komunitas muslim di Indonesia. Sikap dan kepercayaan mereka, terutama bagaimana komunitas santri saling mempengaruhi dari luar komunitas pesantren, banyak yang beranggapan bahwa pesantren adalah pilihan ideal untuk membuat budaya politik santri yang berbeda dari masyarakat umumnya. Oleh karena itu, menurut KH Abdurrahman Wahid kebudayaan pesantren dapat disebut sebagai subkultur. Karena komunitas pesantren dan para pemimpin kiai telah membentuk islam di Indonesia sejak awal, seperti yang dikatakan oleh Benda adalah “ *memang, sejarah islam a'la Indonesia adalah sejarah membesarkan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan keagamaan, sosial dan ekonomi di Indonesia*”⁷. Oleh karena itu pengaruh santri dalam kehidupan sosial Indonesia masih kuat, karena pesantren merupakan institusi yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Maka pendidikan pesantren mempresentasikan pembelajaran unik yang mengolah dimensi agama, budaya

⁶ Rusadi Sumintapura, Sistem Politik Indonesia, (Bandung : Sinar Baru,1988) , 25.

⁷ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik kaum Santri* , (Cet.1 Pustaka Ciganjur 1999) h.75

dan sosial untuk mengintegrasikan pendidikan dalam membentuk sikap komunitas santri.

Namun ketika mereka belajar tentang kondisi sosial politik dimana mereka berada di lingkungan pondok pesantren, maka pesantren akan mempengaruhi dan membentuk orientasi politik pada individu santri. Setiap para santri pasti akan dipengaruhi oleh budaya politik setempat. Budaya politik merupakan fenomena sosial dalam struktur masyarakat yang memiliki sistem tertentu.⁸ Sehubungan dengan hal ini, kiai memiliki peran penting dalam menentukan corak budaya politik masyarakat pesantren. Selanjutnya ada tiga faktor yang menentukan budaya politik masyarakat pesantren yaitu orientasi politik, sosialisasi politik, dan pola kepemimpinan kiai.⁹

Hal ini dapat mengakibatkan, para santri akan menerima perintah apapun dari kiai untuk dilakukan tanpa syarat. Kemudian para santri akan mengambil tindakan yang melembaga terhadap situasi keadaan politik pesantren. Peran sosial kiai yang sangat besar sebagai kunci dalam kehidupan pesantren dari berbagai hal bagi santri – santrinya dan menjadi sumber ilmu pengetahuan yang dicari setiap santri di dalam pesantren. Pengaruh sosial yang sangat besar dari posisi kiai dapat membentuk sebuah pemikiran atau ide gagasan terhadap para santri, sehingga kiai diwujudkan menjadi sistem sosial yang objektif. Pengaruh itu dapat dilihat dalam proses pembentukan perilaku individu para santri dalam lingkungan pesantren, karena santri dapat memahami dan memaknakan kiai sebagai institusi pondok pesantren.

Setiap fenomena pemilihan umum, santri yang berusia 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih, santri dan kiai selalu menjadi perebutan oleh partai-partai politik berbasis Islam maupun juga partai-partai politik berbasis nasional dalam mendapatkan dukungan masa yang lebih banyak. Berdasarkan upaya mereka mencari simpati dari

⁸ <https://media.neliti.com> › mediaPDF Asesmen Budaya Politik Masyarakat ... - Neliti

⁹ <https://media.neliti.com> › mediaPDF Asesmen Budaya Politik Masyarakat ... - Neliti

kalangan santri dan kiai, banyak partai politik yang menempatkan posisi kiai atau tokoh pesantren untuk mengisi sebagai pengurus partai politik dengan mereka mengharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat dalam mendapatkan banyak suara pada saat pemilu. Dari melibatkan kiai atau tokoh pesantren memperlihatkan kecenderungan bahwa nilai politik seorang kiai di hadapan partai politik masih cukup tinggi, karena upaya mereka masih mencari dan membangun dukungan dengan masyarakat pesantren untuk kepentingan politiknya sendiri pada waktu pemilu. Hal ini terlihat dari perhatian yang diberikan oleh kekuatan politik seperti, partai politik dan politisi yang sering melakukan kunjungan ke pondok pesantren yang mempunyai pengaruh besar di lingkungan masyarakat agar mendapatkan dukungan masa. Salah satu nya dengan kegiatan silaturahmi atau kunjungan pimpinan partai politik kepada tokoh maupun kiai pondok pesantren.

Peran santri di masa lalu kelihatan paling menonjol dalam hal memobilisasi yaitu dengan memimpin dan berperang dalam rangka mengusir penjajah. Terlihat juga peran pesantren saat ini sudah sangat jelas, banyak tokoh politik, terutama menjelang pemilihan umum mereka berkunjung atau mendatangi pondok pesantren.¹⁰ Dalam hal ini peran pesantren dalam berpartisipasi kegiatan pemilu menjadikan pesantren sebagai incaran partai politik. Oleh karena itu pondok pesantren beserta santri dan kiai nya mempunyai kekuatan politik yang kuat dan menjadi incaran berbagai macam partai politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pesantren tentunya. Hal ini melibatkan peran dan partisipasi santri dalam memeriahkan pesta demokrasi baik secara langsung atau tidak langsung, contohnya menjadi petugas pemilu dan melakukan kampanye online lewat media sosial secara damai dan jujur. Perilaku para pemimpin sudah tepat, jika mereka tidak dekat dengan pemimpin pesantren, berarti visi-misi mereka

¹⁰ Arifin, Muzayyi. 2007. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara

rendah.¹¹ Oleh sebab itu, penelitian ini tertarik pada pondok pesantren karena ingin mengetahui tingkat partisipasi pemilih santri dalam lingkungan pondok pesantren yang memiliki hubungan sosial dengan agama yang relevan. Apakah santri dalam kegiatan politiknya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, misalnya dalam partisipasi politik dan perilaku politik di lingkungan pondok pesantren.

Maka hal ini peneliti memilih salah satunya pondok pesantren di kabupaten Kudus provinsi Jawa Tengah yang terdapat 86 pondok pesantren yang tersebar di Sembilan (9) kecamatan¹². Salah satunya memilih pondok pesantren AR – Roudlotul Mardliyyah yang didirikan oleh KH. Hisyam Hayat yang bertempat di Desa Janggalan Kecamatan Kota, Kota Kudus Provinsi Jawa Tengah. KH. Hisyam Hayat adalah pihak yang berpengaruh dalam pendirian pondok pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah. Hal ini KH. Hisyam Hayat menggagas suatu model pesantren yang menjadikan santri untuk menghafal Al Qur'an dan juga dituntut untuk melaksanakan ajaran. Seperti yang diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi santri-santri yang berkualitas dan berhasil guna untuk membentuk sikap individu para santri.

Alasan mengapa peneliti memilih pemilih santri karena kelompok pemilih santri masih cenderung awam dan kurangnya pendidikan politik karena pondok pesantren hanya mempelajari tentang ajaran agama Islam sehingga membuka peluang yang cukup besar untuk menanamkan kepedulian politik sejak awal. Pemilu 2019 tidak terlepas dari ramainya suasana politik dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang dilaksanakan secara serentak. Segala aktivitas dan strategi elit politik untuk meraih dukungan suara pemilih di berbagai bidang, seperti pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi incaran berbagai elit politik untuk mencari dukungan dan

¹¹ Tafsir, Ahmad. 2012. *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹²<https://www.google.com/amp/s/betanews.id/2012/12/daftar-pondok-pesantren-di-kudus.html%3famp>

suara pemilih dalam pemilu. Oleh sebab itu penelitian penting untuk dilakukan penelitian.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik santri dalam pemilihan umum tahun 2019 sehingga dapat memberikan pemahaman tentang tingkat partisipasi politik santri di pondok pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah kudas dalam pemilu 2019 sehingga dapat membantu menjelaskan mengenai masalah apa saja yang dihadapi pemilih santri ikut serta dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada uraian diatas maka saya sebagai penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul Partisipasi Politik Santri Pondok Ar-Roudlotul Mardliyyah Kudus Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian hanya tertuju pada kaum santri yang berusia 17 sampai 21 tahun Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah Kudus. Guna mengetahui bentuk dan faktor partisipasi politik santri dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang berada diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah “ **Partisipasi Politik Pemilih Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi kasus pada santri Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah Kudus)**” dengan uraian permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik santri Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah dalam pemilihan umum tahun 2019?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri di lingkungan pondok pesantren di Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik santri dalam pemilihan umum Kabupaten Kudus tahun 2019 di Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri di lingkungan Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah dalam pemilihan umum tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat yaitu

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang afiliasi politik santri dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kudus serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut.
 - b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan atau implementasi teori tentang partisipasi dan perilaku politik yang telah dipelajari peneliti selama dibangku perkuliahan.
 - c. Sebagai pijakan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang partisipasi politik santri.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan untuk meningkatkan pemahaman santri mengenai politik dan demokrasi untuk membantu proses pembelajaran santri di masa mendatang.
 - b. Dapat memberikan gambaran tentang partisipasi politik santri untuk melihat kontribusi seberapa jauh kesadaran politik santri dalam proses pemilu 2019 di Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dari setiap bagian atau keterikatan penelitian ilmiah sistematis selanjutnya. Berikut ini adalah kajian sistematis dari penelitian yang akan ditulis:

- BAB I : Pendahuluan**
 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kerangka Teori**
 Bab ini menjelaskan tentang teori dan pengertian terkait dengan judul penelitian partisipasi politik santri dalam pemilihan umum tahun 2019 di Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah Kudus.
- BAB III : Metode penelitian**
 Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian keabsahan data.
- BAB IV: Hasil penelitian dan analisis data**
 Bab ini berisi hasil penelitian tentang partisipasi politik santri Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah Kudus dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kudus.
- BAB V : Penutup**
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran